

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan viktimologi suatu negara merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi yang penting sekarang adalah mencari fenomena yang relevan, yang mempengaruhi pengembangan viktimologi, yang menjadi partisipan pendukung atau penghambat pengembangan viktimologi di suatu negara. Salah satu faktor pendukung utama yang mempengaruhi kuat pengembangan viktimologi di suatu negara adalah pandangan hidup tertentu bangsa negara tersebut. Diharapkan adanya keserasian dan keselarasan antara pandangan hidup tersebut dengan viktimologi yang akan dikembangkan. Misalnya: pandangan hidup tersebut harus merupakan dasar, landasan pemikiran, konsep-konsep dalam viktimologi yang dikembangkan; konsep-konsep yang ada dalam viktimologi dapat diterima oleh sebab dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pandangan hidup tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pandangan hidup tersebut.<sup>1</sup>

Pandangan, pemikiran, ideologi yang baru timbul dari dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri harus dikaji, diuji dengan pandangan hidup yang telah diterima oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi yang dipermasalahkan sekarang adalah, apakah yang dianggap baru tersebut menurut Pancasila adalah rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 56.

bermanfaat. Hal ini tentunya juga berlaku untuk viktimologi yang dianggap sebagai suatu yang baru dan ingin dikembangkan. Dengan demikian, maka dicari sekarang pemikiran-pemikiran mana yang terdapat dalam pandangan hidup asli tersebut yang dapat mendukung pengembangan viktimologi.<sup>2</sup>

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban.”<sup>3</sup>

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga ia kehilangan

---

<sup>2</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 41.

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25.

kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyelidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi.

Dalam berkehidupan di masyarakat, korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Dan hal inilah yang akan coba dicapai oleh Viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Karena apabila seseorang telah menjadi korban maka orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materill maupun kerugian secara imaterill. Tetapi sebagai korban, orang tersebut harusnya juga dapat diberikan perlindungan baik berupa Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi.<sup>4</sup>

Timbul suatu pemikiran yang baru dimana para aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, dan Hakim dapat mempunyai pemikiran baru bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya menitik beratkan pada kepentingan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi

---

<sup>4</sup> <http://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016, Pukul 21.45 WIB.

juga dapat melindungi kepentingan korban sebagai pihak yang merasa paling dirugikan akibat tindakan pelaku.

Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat yang mengikat setiap warga negara yang tidak mematuhi, bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini, tentunya negara harus mensikapi dengan tindakan tegas dalam wujud penegakan hukum itu sendiri. Salah satu hal yang dilakukan oleh negara adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>5</sup>

Di dalam KUHAP itu sendiri dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Salah satu proses yang mengawali tindakan hukum tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses

---

<sup>5</sup><https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/penyidikan-sebagai-bentuk-kewenangan-kepolisian-dalam-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 9 Februari 2016 Pukul 12.00 WIB.

penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tindak kejahatan ataupun tidak dapat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Berbagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan tidak baik karena berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyelidik Polri dalam melakukan fungsi penyelidikan. Proses penyelidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyelidik polri untuk melaksanakan tugasnya

secara cepat, akuntabel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.

Berbagai contoh kasus dalam ketidaktransparan penyelidikan Polri di antaranya adalah kasus Kebakaran PT. Mandom. Pengacara PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia (IIGI), Luthfi Yazid meminta agar kepolisian melakukan penyelidikan kasus kebakaran pada pabrik PT. Mandom Indonesia secara transparan dan bukan karena tekanan publik. Ini terkait ditetapkannya salah satu staf mereka sebagai tersangka. IIGI hanya bertugas memindahkan tangki dan memasang pipa. Pemasangan itu pun sudah tertulis dalam berita acara dan dinyatakan layak. "Setelah itu, seluruh sistem, telah diserahkan kepada PT. Mandom Indonesia Tbk,".

Luthfi Yazid mengklaim bahwa kliennya merupakan salah satu perusahaan internasional yang menjaga kualitas IIGI yang bekerja dengan mengutamakan keselamatan kerja. Bahkan, selama 18 tahun beroperasi di Indonesia IIGI tidak pernah mengalami kecelakaan kerja.

Luthfi juga mempertanyakan penetapan tersangka yang berasal dari IIGI. Sebab, pekerjaan kliennya sebatas pada pengangkutan dua unit tangki lama dan satu unit tangki baru serta pemasangan pipa. "Sementara polisi telah menyimpulkan bahwa penyebab kebakaran adalah karena pemasangan selang (*flexible hose*)."

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan polisi sekitar dua bulan, pemasangan *flexible tube* yang dilakukan PT. Iwatani Industrial Gas

Indonesia tersebut diduga menyalahi prosedur yang diminta PT. Mandom Indonesia.<sup>6</sup>

Tidak demikian halnya dengan kasus pembunuhan Fransciesca Yofie yang terjadi pada bulan suci Ramadhan, 5 Agustus 2013 di Bandung, Jawa Barat. Kasus terbunuhnya Fransciesca Yofie cukup mengagetkan masyarakat mengingat terjadinya pembunuhan itu tergolong sadis dengan diseret sepeda motor dan korban dibacok tiga kali, di waktu orang berbuka puasa, 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Korban pembunuhan tersebut adalah sosok yang secara fisik dianggap cantik dan merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan jasa keuangan.

Berbagai informasi yang beredar di media menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses penyidikan dan hasil penyelidikan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Sorotan dalam kasus tersebut adalah, pelaku secara tidak sengaja atau telah terencana ingin melakukan pembunuhan terhadap korban, dan ada atau tidaknya kaitan kehadiran pihak lain dalam kasus tersebut terkait dengan adanya hubungan khusus antara seorang anggota Polda Jawa Barat dengan korban. Beberapa kejanggalan muncul setelah tersangka pembunuhan menyerahkan diri dan memberikan keterangan tentang kronologi kejadian kepada pihak kepolisian.

Para ahli dari berbagai bidang ilmu juga turut memberikan opini berdasarkan analisa sesuai keilmuannya. Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Mulyana W. Kusumah mengatakan, kasus Sisca tidak semata-mata

---

<sup>6</sup> <https://metro.tempa.co/read/news/2015/10/14/064709466/kasus-kebakaran-pt-mandom-iwatani-minta-polisi-transparan> diakses pada tanggal 1 Maret 2016 Pukul 19.20 WIB.

perampokan. Kemungkinan ada motif lain di balik tewasnya *Branch Manager* PT. Verena Multi Finance tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Polri, Polri menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), antara lain, sebagai aparat penegak hukum, harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai kasus hukum di tengah masyarakat, baik kasus hukum yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan oleh masyarakat. Berbagai kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya merupakan tugas Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga akan dapat mengungkap kasus-kasus hukum tersebut.

Dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus hukum di tingkat Polres, perilaku dan kemampuan penyidik sangat penting dalam menegakkan hukum. Kemampuan penyidik yang berkualitas, profesional dan kompeten akan dapat menunjang penegakkan hukum yang terjadi di wilayah Polres. Penyidik Polres merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan dan mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Pengetahuan, keterampilan, dan integritas penyidik di tingkat Polres sangat dibutuhkan dalam rangka penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan terhadap berbagai pihak yang dianggap terkait dan terlibat dalam kasus hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://agussubagyo1978.wordpress.com/2015/02/08/mewujudkan-penyidik-polri-yang-profesional-dan-bermoral/> diakses pada tanggal 23 Februari 2016 Pukul 20.00 WIB.



Transparansi Penyelidikan Melalui Pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) merupakan program unggulan yang bersifat segera (*quick wins*) yang merupakan fungsi reksrim. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam proses penyelidikan tindak pidana melalui pemberian SP2HP sejak tahap penerimaan penilaian laporan, tahap penyelidikan, tahap penindakan, tahap pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

*Quick response* Terhadap Fungsi Reskrim dilakukan dengan : kecepatan datang ke TKP (untuk melakukan oleh TKP, indentifikasi, dan laboratorium forensik), cepat dan tepat dalam pelayanan penerimaan laporan Polisi (saksi di BAP), dan kecepatan dalam proses penyidikan tindak pidana. Transparansi dan akuntabilitas dalam fungsi penyidik reskrim difokukan dalam :

1. Penerimaan / pembuatan laporan Polisi (LP) di SPK
2. Pendistribusian LP kepada penyidik
3. Penyampaian Surat Panggilan
4. Proses Pemeriksaan dan Penindakan untuk penyidikan
5. Pembuatan dan penyampaian SP2HP kepada pelapor sesuai dengan tahapan proses penyidikan sejak penilaian laporan sampai dengan penyerahan berkas perkara / SP3
6. Pemberkasan perkara dalam bentuk BAP
7. Penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam tugas pokok Polri di dalam fungsi penyidik reskrim adalah sebagai berikut :

1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau proses penyidikan terhadap kasus hukum yang sedang ditangani oleh personil reskrim.
2. Melibatkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menangani, mengungkap, mengusut dan menyidik kasus hukum tertentu.
3. Meminta masukan, saran dan usulan dari organisasi sosial kemasyarakatan, seperti LSM, Ormas, Orsos dan lain-lain dalam menangani menangani tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
4. Membuka kotak pengaduan masyarakat yang disebar dan ditempatkan ditempat-tempat umum sehingga masyarakat bebas dalam memberikan komplain kepada Polri dalam penanganan kasus hukum.
5. Memberikan keterangan dan informasi kepada masyarakat secara benar dan bertanggungjawab tentang setiap perkembangan penanganan kasus hukum yang sedang ditangani oleh personi reskrim.
6. Mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik terhadap setiap perkembangan dalam penanganan kasus hukum tertentu secara periodik, misalnya dalam setahun sekali, sehingga masyarakat akan mengetahui perkembangan kasus dan tingkat

capaian kinerja personil reskrim dalam menangani kasus hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

7. Membuka dialog dan diskusi dengan berbagai pihak atau *stake holders* dalam membahas kasus hukum yang dilaporkan oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas Polri terhadap masyarakat.
8. Membuat laporan tahunan yang disebarluaskan kepada publik tentang proses penanganan kasus hukum sehingga masyarakat bisa melakukan kritikan dan evaluasi terhadap kinerja Polri.
9. Membuat ketetapan lamanya proses penanganan kasus hukum, mulai dari penerimaan laporan / pengaduan masyarakat sampai dengan pelimpahan BAP ke pihak JPU, misalnya kasus korupsi ditangani selama 90 hari, kasus narkoba ditangani selama 20 hari, dan seterusnya, sehingga masyarakat dapat kepastian penanganan kasusnya.
10. Mengembangkan mekanisme pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh personil reskrim sehingga akan menjauhkan dari pelanggaran dan penyimpangan.

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP mengatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk

melakukan penyelidikan. Dari penjelasan kedua Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.<sup>8</sup>

Konstitusi Indonesia mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang didalamnya mencakup pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu badan publik yang telah mempersiapkan mekanisme internal tersebut dengan membuat Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. Kebijakan ini signifikan mengingat Polri adalah salah satu badan publik sipil yang memiliki fungsi untuk melindungi dan melayani masyarakat sebagai upaya menuju pemolisian yang demokratis.

Di sisi lain, mekanisme ini juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan perangkat keterbukaan informasi, memastikan *access to justice* serta mengawal pemerintahan sebagai bentuk kontrol publik. Peran serta masyarakat sipil untuk menggunakan berbagai perangkat internal Polri untuk mendorong reformasi institusi ini menjadi sangat signifikan untuk memastikan pelaksanaan mekanisme ini bisa berjalan secara efektif. Pentingnya peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda

---

<sup>8</sup> [http://repository.unand.ac.id/17409/1/skripsi\\_der1.pdf](http://repository.unand.ac.id/17409/1/skripsi_der1.pdf) diakses pada tanggal 28 Januari 2016, Pukul 21.45 WIB, dengan kata kunci Transparansi Informasi Penyidik.

keterbukaan informasi publik telah diatur pada aturan nasional sebagai bagian untuk mendorong pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Di Negara Indonesia sendiri penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan.

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan,

---

<sup>9</sup> <http://download.portalgaruda.org/article.php?article> diakses pada tanggal 29 Januari 2016, Pukul 21.30 WIB.

intimidasi, rekayasa, pemerasan, pungutan liar, serta ketidaktransparanan informasi kepada tersangka dan keluarga tersangka. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain ketidaktransparanan informasi, dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya.

*Restorative Justice* menjadi wacana yang sangat populer ditengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal di dominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah pidana yang dialaminya di luar sistem.<sup>10</sup>

Penyelesaian di luar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian

---

<sup>10</sup> Eva Ahjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2001.

terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses yang berjalan.

Terdapat pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Selain itu, betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum selama ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. J.E. Sahetapy yang menegaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, yaitu faktor aparat penegak hukum, kompleksnya kriminalitas, serta tingginya tuntutan masyarakat akan kesigapan, kejujuran, dan profesionalisme para penegak hukum. Bahkan semakin gencar dan tajam suara-suara yang mengatakan, penegakan hukum dewasa ini sudah sampai pada titik terendah.

Masyarakat melihat dengan pesimis kondisi penegakan hukum, sehingga Prof. Baharuddin Lopa pernah mengungkapkan “di mana lagi kita akan mencari dan menemukan keadilan”. Hingga kini masih banyak suara-suara pesimistik tentang eksisnya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan sistem hukum di negara kita.

Di negara berkembang khusus di dalam praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak berlakunya KUHAP pada tahun 1981, adalah masalah

transparansi, profesionalitas, dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengamatan seksama terhadap latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membuat penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk Skripsi dengan judul: TINJAUAN VIKTIMOLOGIS MENGENAI KETIDAKTRANSPARAN INFORMASI PENYELIDIK POLRI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pandangan viktimologi terhadap korban tindak pidana atas ketidaktransparanan informasi penyelidik Polri?
2. Bagaimana transparansi informasi yang diberikan oleh penyelidik Polri?
3. Upaya apa yang harus dilakukan penyelidik tindak pidana agar dapat memberikan transparansi informasi?

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, Bagian Pendahuluan.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin Mengkaji Bagaimana korban tindak pidana atas ketidaktransparan informasi penyelidikan POLRI dalam pandangan viktimologi.
2. Ingin Mengkaji Bagaimana Perbandingan Proses Penyelidikan di dalam KUAHP Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Ingin Mengkaji Upaya apa yang bisa dilakukan korban tindak pidana agar mendapatkan transparansi informasi dari Penyelidik Polri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum acara pidana lebih khusus tentang transparansi dalam penyelidikan di lembaga kepolisian.
  - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai

transparansi penyelidikan kepada korban tindak pidana di lembaga kepolisian.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta menjadi acuan dalam menjunjung HAM bagi korban tindak pidana.
- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, lalu secara bersama-sama memberantas mafia peradilan hukum yang selalu melecehkan masyarakat kecil.

## E. Kerangka Pemikiran

Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan, oleh karena itu membutuhkan hukum untuk dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, serta membumikan, hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat

ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap teks hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pancasila sila ke dua yang menyatakan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, maka seharusnya semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali meskipun ia masyarakat biasa maupun pejabat Negara. Sila ke lima yang menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sesuai dengan sila kelima seharusnya Pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas diantaranya yaitu Asas Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*): Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>12</sup> Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 6.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.<sup>13</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau

---

<sup>13</sup> Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 177.

pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>14</sup>

Korban sendiri dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Sedangkan yang dimaksud akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>15</sup>

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.<sup>16</sup>

Sahetapy memberikan pengertian korban tidak hanya dibatasi sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timabulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi, hal ini dapat dilihat pendapatnya mengenai korban yaitu: “korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>15</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 34.

<sup>16</sup> Arief Gosita, *Masalah Kejahatan*, *Op.Cit*, hlm. 51.

Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.

Namun demikian sejalan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, terutama yang relevan bagi Polri adalah makna bahwa keterbukaan publik itu adalah keharusan, namun juga perundangan itu memungkinkan pengecualian bagi informasi tertentu yang tidak harus segera dibuka, misalnya karena dalam dunia kepolisian terdapat upaya penyelidikan, penyidikan dan proses hukum lainnya, yang mungkin saja tidak semuanya dapat bersifat terbuka untuk publik. Kualitas informasi yang dimaksudkan disini juga adalah makin tersedianya dengan mudah dan terbuka jenis-jenis informasi tertentu yang penting bagi upaya meningkatkan kualitas pelayanan Polri dan dalam kerangka pula meningkatkan pengembangan demi kemajuan sebuah proses hukum di masyarakat.

Konstitusi Indonesia mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang didalamnya mencakup pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu badan publik yang telah mempersiapkan mekanisme internal tersebut dengan membuat Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. Kebijakan ini

signifikan mengingat Polri adalah salah satu badan publik sipil yang memiliki fungsi untuk melindungi dan melayani masyarakat sebagai upaya menuju pemolisian yang demokratis.

Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 butir (5) KUHAP adalah Suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan. Kemudian yang berwenang melakukan penyelidikan adalah :<sup>17</sup>

Menurut KUHAP (pasal 1 butir 4) yaitu : Polisi (dari pangkat tertinggi hingga terendah) Menurut Undang-Undang lain yaitu : Jaksa, Bapepam (Pasar Modal), Tamtamal (Angkatan Laut) Dll

Tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP didasarkan: Karena wewenang, dan atas perintah Penyidik.

Sedangkan pengertian Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.<sup>18</sup> Kemudian yang berwenang melakukan Penyidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir (1) Jo Pasal 6 adalah :

- 1) Polisi (Pembantu Letnan Dua)
- 2) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum.
- 3) Undang-Undang lain yaitu : Jaksa, untuk tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 butir (5) KUHAP.

<sup>18</sup> Pasal 1 butir (2) KUHAP.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.<sup>19</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum

---

<sup>19</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.



adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan *yuridis normatif*, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>21</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>21</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>22</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>23</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>24</sup> berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 14.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur (kepuustakaan), yaitu data sekunder yang relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Telaah data sekunder dijadikan sebagai telaah awal, dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan. Telaah sekunder akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, makalah-makalah ilmiah, dan kepustakaan lain yang relevan. Penelaahan literatur atau dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen, arsip, catatan, transkrip dan lain-lain.<sup>25</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu

---

<sup>25</sup> Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari, *Penelitian Hukum Transformasi Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep*, Litigasi, Vol. 17 No. 2, Oktober 2016, <http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159/75>, di akses pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 14.00 WIB.

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>26</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

### b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan tidak menggunakan rumus, statistik dan matematik. Metode yuridis kualitatif

---

<sup>26</sup> Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.108.

yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.<sup>27</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

### a. Lokasi Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas katolik Parahyangan, Jln. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No. 65 Bandung.

### b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Polrestabes Kota Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Bandung
- 2) Komnas HAM Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27 Bandung
- 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 37.

## 8. Rencana Penelitian

NO.	Kegiatan	Tahun 2015-2016					
		Bulan					
		Des	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei
1.	Persiapan judul dan Acc judul penyusunan penulisan hukum						
2.	Persiapan studi kepustakaan						
3.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar						
4.	Seminar usulan penelitian						
5.	Pelaksanaan penelitian						
6.	Penyusunan data Bab I sampai dengan Bab V, revisi koreksi bimbingan dan Acc untuk sidang komprehensif						
7.	Sidang komprehensif						
8.	Revisi penjiilidan, penggandaan dan pengesahan						

Keterangan : Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat berubah.